



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KE KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA RUMANIA
DAN
ROMANIAN COURT OF ACCOUNTS
(BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RUMANIA)
DI NEGARA RUMANIA**

26 JUNI 2023 s.d. 02 JULI 2023



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. LATAR BELAKANG	3
	B. DASAR HUKUM	5
	C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI.....	5
	D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA.....	8
	E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA.....	9
BAB II	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA.....	10
	A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI.....	10
	B. AGENDA KEGIATAN.....	11
	1. Pertemuan dengan KBRI Rumania	14
	2. Pertemuan dengan <i>Romanian Court Of Accounts</i> (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania)	17
BAB III	PENUTUP	25
	Lampiran I	26
	Lampiran II	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran. Kemudian untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi. Maka untuk memperkuat fungsi pengawasan, dibentuklah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

Kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa: “DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan “DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK”.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D ayat 1 menyebutkan: “BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR”.

Kunjungan Teknis ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *Learning By Doing* bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari negara yang dikunjungi oleh anggota delegasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Keputusan Rapat BAKN DPR RI tanggal 16 Mei 2023

C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI

Rumania secara geografis berada di titik persimpangan antara Eropa tengah, timur dan tenggara. Dengan luas wilayah sekitar 238.397 kilometer persegi .Rumania menjadi negara terluas di Balkan dan terluas ke 12 di Eropa. Ibukota Rumania sekaligus kota terbesar di negara ini adalah Bucharest, dengan kota kota penting lainnya adalah Cluj-Napoca, Timisoara, Insi, Constanta, Craiova, dan Brasov.

Negara ini dialiri oleh Danube, sungai terpanjang kedua di Eropa, sungai Danube sendiri mengalir mengalir melintasi sepuluh negara hingga akhirnya bermuara di Delta Danube, Laut Hitam (masih termasuk wilayah Rumania). Di bagian utara hingga barat daya terbentang pegunungan Carpathia. Rumania berbatasan darat dengan Republik Moldova di Timur Laut, dengan Ukraina di Utara, dengan Hungaria di barat, Serbia di Barat Laut, Bulgaria di Selatan dan Laut Hitam di sebelah Timur.

Rumania mempunyai populasi sebanyak 19.328.838 jiwa menjadikan negara terpadat ke 6 di Uni Eropa. Dalam konteks global dengan jumlah penduduk yang dimiliki saat ini (data tahu 2020) Rumania menduduki posisi ke 61 di dunia atau sekitar 0,25 % dari total populasi dunia.

Jumlah penduduk di Rumania mengalami tren menurun dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah penduduk Rumania tahun 2020 menurun 0,66 %. Penurunan populasi ini terutama disebabkan oleh rendahnya

angka kelahiran dan tingginya tingkat imigrasi warga negara Rumania ke luar negeri di dorong oleh keinginan mencari penghidupan yang lebih layak.

Rumania merupakan negara dengan wilayah terluas ke-9 dan penduduk terbanyak ke-7 di Uni Eropa. Ibukota dan kota terbesar Rumania adalah Bucharest yang juga merupakan kota terbesar ke-6 di Uni Eropa.

Sumber kekayaan utama Rumania adalah minyak bumi dan gas, terutama terdapat di daerah Floiest, berdasarkan survei dan pemetaan yang dilakukan ditemukan cadangan minyak bumi di Laut Hitam yang volumenya mencapai 6,3 milyar meter kubik per tahun (yang berarti setengah produksi gas alam Rumania saat ini), sehingga Rumania menjadi salah satu produsen minyak Eropa. Eksplorasi minyak bumi dan gas awalnya dilakukan oleh negara melalui perusahaan Petrom, namun telah diambil alih oleh presiden Austria pada tahun 2010.

Rumania merupakan penghasil produk pertanian terbesar ke 7 di Eropa di bawah Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda dan Polandia. Hasil utamanya adalah gandum, kentang, bunga matahari, tomat dan apel. Pertanian menjadi andalan Rumania yang menyerap sekitar 43,1% tenaga kerja di Rumania. Ini tidak mengherankan sebab lebih dari 40 % penduduk Rumania tinggal di Kawasan pedesaan. Rumania adalah penghasil sereal terbesar ke 3 serta penghasil sayur dan buah-buahan ke 10 di Eropa.

Rumania adalah republik demokratis multipartai. Fungsi eksekutif dijalankan oleh presiden dan perdana menteri. Presiden Rumania dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Presiden menunjuk perdana menteri, yang mengepalai pemerintahan. Cabang legislatif pemerintahan Rumania, yang dikenal sebagai Parlemen (*Parlamentul României*), terdiri dari dua majelis, Senat dan Majelis Rendah (*Camera Deputaților*). Anggota dari kedua majelis ini dipilih setiap empat tahun.

Sejak Desember 1989, Rumania terus memperkuat hubungan dengan Barat, terutama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rumania bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada 29 Maret 2004, Uni

Eropa pada 1 Januari 2007, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia pada tahun 1972 serta bergabung dengan *World Trade Organization* pada 1 Januari 1995.

Hubungan diplomatik dan politik antara Indonesia dan Rumania berkembang sejak pembukaan hubungan diplomatik 72 tahun lalu serta berjalan dengan baik yang tercermin dari frekuensi saling kunjung antara pejabat kedua negara. Republik Indonesia dan Rumania telah melaksanakan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-6 pada tanggal 18 Juni 2015 bertempat di Kementerian Luar Negeri Rumania di Bucharest. Pihak Rumania memandang potensi Indonesia sebagai pintu gerbang produk-produk Rumania di kawasan Asia Tenggara sementara pihak Indonesia dapat memanfaatkan Pelabuhan Constanta sebagai pintu masuk produk-produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, nilai perdagangan Indonesia dengan Rumania tahun 2021 sebesar USD146,17 juta, surplus di pihak Indonesia sebesar USD 65,97 juta dengan nilai ekspor Indonesia ke Rumania sebesar USD106 juta tetapi nilai perdagangan tahun 2021 mengalami penurunan 4,7% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD 153,43 juta.

D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA

Akuntabilitas merupakan konsep dasar kinerja BAKN. Hal ini karena BAKN melalui tugas dan fungsinya bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN juga memastikan agar penggunaan keuangan negara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh BAKN bertujuan agar akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan keuangan negara terlaksana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping asas akuntabilitas, fungsi pengawasan oleh BAKN juga mendorong penggunaan keuangan negara yang efisien dan efektif bagi seluruh lembaga negara dan pengguna keuangan negara.

BAKN 2019-2024 merupakan alat kelengkapan dewan "termuda" pada DPR RI periode 2019-2024 mengingat BAKN baru kembali dibentuk pada tahun 2018 sehingga membutuhkan contoh pola kerja yang baik dari alat kelengkapan dewan serupa di negara-negara lain. Saat ini, BAKN masih terus mencari bentuk pola kerja terbaiknya dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal utama yang menjadi isu utama pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BAKN yaitu:

1. Peningkatan kualitas penelaahan hasil pemeriksaan BPK. Dengan kualitas penelaahan yang komprehensif dan berkualitas baik, dapat menjadi dasar dalam melakukan keputusan politik DPR RI terkait penggunaan keuangan negara oleh seluruh entitas yang mendapatkan pendanaan dari keuangan negara.
2. Pola kerja terkait tindak lanjut hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK. Dengan pola kerja BAKN saat ini yang sifatnya "*bottom up*", perlu diketahui mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan negara lain yang memiliki tugas serupa dengan BAKN.
3. Hubungan BAKN dengan BPK RI selaku *supreme audit institution*. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, disebutkan bahwa BAKN dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan

kualitas laporan. Dalam hal ini BAKN perlu mengetahui hubungan kerjasama yang ideal antara BAKN dengan BPK. Kerjasama ini terutama mengenai data dari BPK yang menjadi basis penelaahan bagi BAKN.

4. Hubungan BAKN dengan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dan juga merupakan *counterpart* dari komisi-komisi di DPR RI.

E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Tujuan utama dari BAKN DPR RI berkunjung ke negara Rumania adalah sebagai berikut:

1. Memahami tugas, fungsi, wewenang dan gambaran secara umum mengenai Parlemen Rumania serta gambaran secara khusus Public Accounts Committee yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dan Court of Accounts dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.
2. Memahami mekanisme kerja antara Public Accounts Committee dengan Court of Accunts, dan bagaimana Public Accounts Committee mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran jenis-jenis, ruang lingkup, time schedule pemeriksaan keuangan negara oleh Courts of Accounts, penyampaian hasil pemeriksaan kepada Parlemen Rumania, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara Parlemen dengan Public Accounts Committee..
4. Mendapatkan gambaran bagaimana Public Accounts Committee melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Court of Accounts, dan bagaimana hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada Parlemen dan committee lainnya yang terkait.
5. Mendapatkan gambaran hubungan kerja antara Public Accounts Committee dengan committee lain di Parlemen, khususnya terkait hasil pemeriksaan Court of Accounts terhadap mitra kerja committee lain.

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kegiatan Kunjungan Ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Rumania dan Romanian Court Of Accounts (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania) Di Negara Rumania 26 Juni 2023 S.D. 02 Juli 2023, diikuti oleh 10 (sepuluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota BAKN DPR RI, 2 (dua) orang Staf Sekretariat BAKN DPR RI, dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BAKN DPR RI sebagai berikut.

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si	F-Demokrat	Ketua BAKN
2.	A-201	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	F-PDIP	Wakil Ketua BAKN
3.	A-423	Dr. Hj. Anis Byarwati	F-PKS	Wakil Ketua BAKN
4.	A-83	Ir. Irwan Ardi Hasman	F-GERINDRA	Anggota
5.	A-26	H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M.	F-PKB	Anggota
6.	A-476	Dr. H.M. Amir Uskara, M. KES.	F-PPP	Anggota
7.	A-498	Primus Yustisio, SE., MAP	F-PAN	Anggota
8.	-	Dwian Pujaswati, S.E.	-	Ka Subag TU Set BAKN
9.	-	Nurul Istiqlal	-	Staf Set BAKN

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
10.	-	Vivi Adeyani Tandean, M.Ak., CA.	-	Tenaga Ahli BAKN

B. AGENDA KEGIATAN

Adapun acara Kunjungan Kerja Luar Negeri BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan Fungsi Diplomasi dan Untuk Mendapatkan Masukan Terkait Fungsi Dan Tata Kerja Romanian Court Of Accounts (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania) serta kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Rumania yang dilaksanakan dari tanggal 26 Juni 2023 S.D. 02 Juli 2023 dengan agenda kegiatan sebagai berikut.

NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	MINGGU, 25 JUNI 2023		
	22.00	Delegasi sudah berkumpul di Bandara Soetta	
2.	SENIN, 26 JUNI 2023		
	01.10	Take off menuju Doha	
	05.25 – 09.00	Transit di Doha (DOH)	Transit 3 jam 35 menit
	09.00	Take off menuju Bucharest (OTP)	
	14.00	Tiba di Bucharest (OTP)	
	19.30	Makan malam	
3.	SELASA, 27 JUNI 2023		
	07.00 – 08.00	Sarapan di Hotel	

09.00	Berkumpul di lobby hotel Novotel Bucharest City Centre	Hotel Novotel Bucharest City Centre
09.15 – 10.00	Menuju Kantor KBRI	
10.00 – 12.00	Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI beserta Pendamping dengan KBRI Rumania dilanjutkan makan siang bersama di Restoran Mandaloun	Restauran Mandaloun Maps: http://g.co/kgs/h2qHxC
13.00 – 15.00	Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dan BPK RI dengan Romanian Court of Accounts	Membahas mekanisme kerja Romanian Court of Accounts
	Kembali ke Hotel	
4. RABU, 28 JUNI 2023		
06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
08.00 – 16.00	Melanjutkan rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
19.30	Kembali ke Hotel	
5. KAMIS, 29 JUNI 2023		
06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
08.00 – 16.00	Melanjutkan rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
19.30	Makan Malam	
6. JUMAT, 30 JUNI 2023		
06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	

08.00 – 16.00	Melanjutkan rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
19.30	Makan Malam	
7. SABTU, 1 JULI 2023		
06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
08.00 – 16.00	Melanjutkan rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
19.30	Makan Malam	
8. MINGGU, 2 JULI 2023		
13.00	Menuju Bandara Bucharest (OTP)	
14.00	Check in Penerbangan ke Jakarta	
17.30	Take off menuju Doha (DOH)	
22.00 – 02.25	Transit di Doha (DOH)	Transit 4 jam 25 menit
9. Senin, 3 Juli 2023		
02.25	Take off menuju Jakarta (CGK)	
15.25	Tiba di Jakarta	

Adapun informasi yang didapat oleh para anggota delegasi BAKN DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rumania

Selama di Bucharest, Rumania, Delegasi BAKN DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha *ad interim* Vidya Pertiwi Republik Indonesia untuk Negara Rumania beserta jajarannya di KBRI Rumania. Dalam pertemuan tersebut, Kuasa Usaha *ad interim* Vidya Pertiwi menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut.

- a. Menyambut baik kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dikarenakan bisa melakukan transformasi informasi secara langsung antara BAKN DPR RI (legislatif) dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- b. Delegasi BAKN DPR-RI dalam melakukan pertemuan dengan KUI RI KBRI Bucharest beserta jajarannya membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Rumania.
- c. Diharapkan dengan adanya kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dapat mendapatkan konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang lebih baik dan dapat menjadi dasar dalam penerapan serta perbaikan pada sistem pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara di Indonesia.
- d. Pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Romanian Court Of Accounts (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania) mengikutsertakan pihak KBRI menghasilkan hal yang sangat positif serta informasi-informasi yang sangat bermanfaat serta sangat berkualitas bagi kedua belah pihak.



Gambar 1.1
Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rumania



Gambar 1.2
Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rumania



Gambar 1.3
Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rumania



Gambar 1.1
Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rumania

2. **Pertemuan dengan *Romanian Court Of Accounts*** (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania)'

Sejarah berdirinya *Romanian Court of Accounts* (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania).

Romanian Court of Accounts yang dahulunya bernama Pengadilan Akun didirikan oleh Hukum 24 Januari 1864, yaitu lima tahun setelah Persatuan Kerajaan Rumania, pada tahun 1859, “ dengan ingin memberikan jaminan lebih kepada Negara tentang keinginan, bahwa penggunaan uang publik tunduk pada kontrol, sama seriusnya dengan bebas dari kecurigaan pengaruh dari agen yang bertanggung jawab atas administrasi anggaran”, penguasa Alexandru Ioan Cuza mengumumkan Undang-undang untuk pembentukan Pengadilan Akun.

Markas besar *Court of Accounts* diresmikan pada Mei 1899, di hadapan Raja Carol I dan Pangeran Ferdinand, bersama dengan Menteri Keuangan, George Manu, dan pejabat penting negara. Upacara dimulai dengan te deum yang diresmikan oleh Archimandrite Niphon, vikaris Metropolitanate. Pada kesempatan yang meriah ini, penjabat presiden *Court of Accounts*, George Lahovari, dihiasi dengan Salib Besar Ordo Mahkota Rumania. Dengan demikian, setelah 35 tahun sejak berdirinya, dari tahun 1864 sampai dengan tahun 1899, untuk pertama kalinya *Court of Accounts* memiliki kantor pusat sendiri.

Pasal 116 Undang-Undang Dasar 1923 (dimuat dalam Lembaran Negara No. 282 tanggal 29 Maret 1923) mengatur bahwa pengendalian preventif dan pengelolaan semua penerimaan dan pengeluaran negara akan dilakukan oleh Pengadilan Pertanggungjawaban, yang setiap tahun mengajukan kepada laporan APBD yang lalu, menyoroiti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para menteri dalam pelaksanaan anggaran. Menurut UU 1929, Pengadilan Akun adalah lembaga independen, berkedudukan sama dengan Pengadilan Tinggi Kasasi dan memiliki hak yang sama. Melalui peraturan baru ini, Pengadilan Akun mempertahankan kontrol dan atribusi yudisialnya.

Dalam konteks sejarah 1938-1948 kerugian teritorial, perang, pendudukan Soviet, serta pembentukan rezim komunis - terjadi perubahan besar yang juga mempengaruhi aktivitas Pengadilan Akun. Maka, dengan keputusan Majelis Agung Republik Rakyat Rumania, tertanggal 1 Desember 1948, *Court of Accounts* dihapuskan. Fungsi kontrol keuangan diambil alih oleh Kementerian Keuangan, melalui departemen kontrol internal khusus yang dibentuk di dalam

kementerian, perusahaan negara, pemerintah daerah dan lembaga publik, dan Rumah Sakit Nefrologi Carol Davila dipindahkan ke gedung tempat Pengadilan Akun dulu.

Dengan UU no. 2 sejak tanggal 28 Maret 1973, dimuat dalam Lembaran Negara No. 44 sejak 30 Maret 1973, Pengadilan Tinggi Kontrol Keuangan didirikan, beroperasi di bawah Dewan Negara. Undang-undang tersebut diubah dengan Keputusan No. 150 dari tanggal 19 Juni 1974 dan No. 36 dari tanggal 21 Februari 1981. Pengadilan berwenang untuk melakukan kontrol keuangan dan yurisdiksi. Undang-undang tersebut memasukkan sejumlah ketentuan khusus untuk negara totaliter, seperti: Pengadilan Tinggi Pengawasan Keuangan berusaha untuk mematuhi keputusan Partai dan Negara di bidang keuangan dan untuk mempertahankan properti sosialis.

Runtuhnya rezim komunis di Rumania, setelah Revolusi Desember 1989, menyebabkan penghapusan Pengadilan Tinggi Pengendalian Keuangan, dengan Keputusan no. 94 / 07 Februari 1990, dikeluarkan oleh Dewan Front Keselamatan Nasional. Dengan demikian, atribusinya diambil alih, menurut art. 1 dari keputusan masing-masing, oleh Korps Kontrol Ekonomi-Keuangan Perdana Menteri dari Pemerintah Rumania, dan kemudian oleh Direktorat Jenderal Kontrol Keuangan Negara dari Kementerian Keuangan.

Konstitusi Rumania memulihkan Pengadilan Akun di tempatnya, dalam kelompok lembaga penting dari negara demokratis. *Court of Accounts* melakukan kontrol atas pembentukan, pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan negara dan sektor publik.

Direktorat Jenderal Pengendalian Keuangan Negara dari Kementerian Keuangan menghentikan kegiatannya, dan Parlemen Rumania menekankan ketentuan teks konstitusi dengan mengadopsi UU No. 94/1992 tentang organisasi dan fungsi Mahkamah Akun Rumania

Pengadilan Akun Rumania melanjutkan aktivitasnya pada tanggal 1 Maret 1993. Lembaga ini awalnya beroperasi di gedung Istana Parlemen. Pada bulan Juli 1993 bangunan di jalan Lev Tolstoi no 22-24, Bukares, yang menjadi markas atau kantor ***The Romanian Court Of Accounts Office.***

Delegasi BAKN DPR-RI yang dipimpin H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si telah melakukan kunjungan kerja ke Rumania dalam rangka melakukan pertemuan dengan *Romanian Court of Accounts* (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania).

Pertemuan dilakukan dalam rangka sharing best practices, melakukan pertukaran informasi terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara di Rumania dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BAKN DPR-RI didampingi KUI RI, PF. Politik, PF. Ekonomi dan staf KBRI Bucharest.

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Rumania diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rumania serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

1. Keanggotaan BPK itu dipimpin oleh pleno yaitu berjumlah 18 orang mempunyai masa jabatan selama 9 tahun, yang diatur dalam UU dasar yaitu 1 kali dan tidak dapat diperpanjang. Yang memimpin BPK di sebut Presiden (Ketua BPK) dan 2 orang wakilnya dipilih oleh Parlemen, mereka adalah orang yang senior, dari 18 orang anggota pleno setiap 3 tahun 6 orang akan diganti. Setelah dievaluasi selama masa jabatan sekarang ini ternyata sistem sekarang itu kurang bagus dan lebih baik kalau dilakukan penggantian secara keseluruhan, agar dapat bekerja sama dengan mudah dan harmonis.
2. *The Romanian Court Of Accounts* bekerja sebagai Lembaga yang modern, dengan dasar hukum sebagai pegangan dalam bekerja adalah Undang undang Dasar Rumania No 94 tahun 1992 pasal 140 tentang BPK Rumania. Dalam pasal tersebut tertera bahwa Lembaga yang bisa memeriksa, bagaimana membentuk administrasi dan melaksanakan keuangan negara dan sektor publik juga.
3. BPK menyampaikan laporan setiap tahun kepada Parlemen satu laporan tentang pemeriksaan APBN, pelaksanaan pemeriksaan anggaran dilakukan setelah tahun anggaran selesai. Parlemen meminta kepada BPK 2 atau 3 laporan pertahun.
4. Rapat kerja dibuat dan disetujui oleh Pleno BPK Rumania, siapa yang diperiksa adalah Lembaga atau otoritas administrasi publik sentral, kantor

Presiden dan beberapa kementerian lain yang audit setiap tahun, dan sekali setiap 3 tahun BPK mengaudit Lembaga non pemerintahan lokal, asosiasi-asosiasi, yayasan yang menerima dana dari pemerintah, dan instansi lain yang mengelola dana pemerintah.

5. BPK Rumania dalam membuat dan menyetujui anggaran sendiri yang nanti masuk dalam APBN oleh Kementerian Keuangan.
6. Sistem kerja BPK adalah independent, integritas, kompetensi professional, kerahasiaan, dan tata kerja. BPK berusaha menjadi contoh untuk Lembaga publik lain, perlu menjadi Lembaga yang bekerja secara independent, transparan dan professional. Untuk itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua *stick holder*, yaitu pemerintah, parlemen dan semua pihak yang terkait.
7. Rumania sudah 50 tahun hidup dalam komunis sehingga mentalitasnya masih kuat ajaran komunis, dan perlu 30 tahun untuk merubahnya. Yang paling penting dan yang paling berat adalah merubah mentalitas, karena beberapa Auditor kalau mengaudit harus ketemu yang salah (selalu mencari kesalahan).
8. Perbedaan dahulu jumlah kasus yang di audit sangat banyak tergambar dalam pembuatan laporan kasus yang diaudit jumlahnya sangat banyak tetapi kualitas auditnya kurang baik. Sekarang BPK dengan bantuan dari Amerika Serikat, mempunyai misi baru yaitu merubah tentang misi audit yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit kepatuhan.
9. Tahun 2023 BPK Rumania dalam melakukan audit mengikuti Standar Internasional, sebelum mengikuti standar internasional sebanyak 98 % dari hasil pemeriksaan tidak sesuai, karena menurut standar atau prosedur Rumania dahulu bila ketemu satu kesalahan maka opininya adalah tidak sesuai, hal tersebut membuat Rumania mempunyai masalah besar.
10. Pada saat perusahaan yang dimiliki pemerintah sahamnya sebesar 50 % adalah Perusahaan BUMN dilakukan Audit oleh BPK, dan anak perusahaan BUMN juga dilakukan audit, di Rumania pemerintah mempunyai sedikit saham perusahaan seperti 25 % saham, 30 % saham, 40 % saham dan hanya sedikit perusahaan pemerintah yang memiliki saham sebesar 50 %.
11. Dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan BPK mempunyai 1 Sekretaris Jenderal yang mendukung dibidang sumber daya manusia, administrasi, dan teknologi informasi. Jumlah karyawan kontrak 203 orang, dan secara keseluruhan karyawan di 42 kantor cabang adalah 1.393 orang yang terdiri dari 62,27 % adalah karyawan wanita dan 37,73 % adalah karyawan laki laki. Dari jumlah karyawan tersebut terbagi atas 70 % adalah Auditor publik sisanya administrsai, jumlah karyawan auditor terbagi atas

beberapa tugas yaitu sebanyak 77 % adalah auditor keuangan, sebanyak 3 % adalah auditor kinerja dan sebanyak 20 % bertugas di auditor kepatuhan, jumlah persentase auditor kinerja sangat kecil yang seharusnya jumlah berjumlah 75 %.

12. Tantangan utama yang dihadapi BPK Rumania dalam melaksanakan tugasnya adalah :

Faktor Intern :

- a. Kepemimpinan perguruan tinggi dalam menghasilkan kualitas lulusannya.
- b. Desentralisasi keputusan atau laporan yang dipusatkan.
- c. Kualitas laporan audit yang terlalu tebal sehingga perlu dibuatkan *Eksekutif Summery* untuk memudahkan orang dalam membaca laporan hasil pemeriksaan.
- d. Kurangnya sistem kontrol kualitas.
- e. Kultur organisasi yang mencari keselamatan masing masing.
- f. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan aktivitas audit, kemampuan yang tidak merata dalam semua bidang pemeriksaan.
- g. Komunikasi internal yang kurang berjalan lancar.
- h. Faktor antara struktur RCC pusat dan daerah.
- i. Kurangnya sistem TI yang terintegrasi.
- j. Sejumlah besar misi audit wajib.

Faktor Eksternal :

- a. Hubungan dengan Parlemen yang masih perlu diperbaiki.
- b. Kurangnya transparansi/komunikasi yang buruk dengan pemangku kepentingan



Gambar 2.1
Pertemuan dengan Romanian Court Of Accounts



Gambar 2.2
Pertemuan dengan Romanian Court Of Accounts



Gambar 2.3
Pertemuan dengan Romanian Court Of Accounts



Gambar 2.4
Pertemuan dengan Romanian Court Of Accounts



Gambar 2.5
Pertemuan dengan Romanian Court Of Accounts



Gambar 2.5
Pertemuan dengan Romanian Court Of Accounts

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Negara Rumania ini disampaikan. Kiranya laporan ini nantinya akan dapat menjadi bahan kajian, pertimbangan dan rujukan dalam meningkatkan peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam menjalankan tugasnya.

Jakarta, Juli 2023

**BADAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA DPR RI,
KETUA**

H. WAHYU SANJAYA S.E.

A-533

LAMPIRAN I

30 TAHUN PENGADILAN AKUN ROMANIA (1992 -2022)

Dalam rangka ulang tahun ketiga puluh pendirian kembali lembaga audit tertinggi, yang mendasar bagi setiap konstruksi demokrasi yang solid yang bertujuan untuk pengelolaan uang publik yang baik, Romfilatelia memperkenalkan ke dalam sirkulasi pada hari Kamis, 8 September tahun ini, prangko terbitkan Pengadilan Akun Rumania (1992 -2022).

Di dalam terbitan tersebut, gabungan dari dua prangko, dengan nilai nominal Lei 10 dan Lei 10,50, dua lembar mini, satu blok cinderamata berlubang yang terdiri dari empat prangko dan Sampul Hari Pertama, digambarkan elemen identitas, yaitu pejabat lembaga dan hari jadi logo dan logo yang menunjukkan eanggotaannya pada organisasi internasional dan gedung tempat lembaga tersebut berkantor pusat.

Didirikan pada tahun 1864 oleh penguasa Alexandru Ioan Cuza, Pengadilan Tinggi Akun memiliki peran penting dalam perkembangan negara Rumania modern. Sebuah lembaga yang dirancang untuk mengawasi administrasi sumber daya keuangan negara tidak dapat absen dari negara modern yang sedang berkembang. Peran Pengadilan Akun dan tempatnya dalam ansambel kelembagaan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Konstitusi tahun 1866 dan 1923 dan oleh undang-undang khusus.

Pada periode antar perang, melalui Undang-Undang yang diadopsi pada tahun 1929, kontrol dan kekuasaan yudisial dari *Court of Accounts* diperkuat, institusi yang menerima peringkat yang sama dengan Pengadilan Tinggi Kasasi. Sayangnya, krisis ekonomi yang mengikutinya, rezim diktator dan tahun-tahun perang mempersulit aktivitas Pengadilan Tinggi Pertanggungjawaban, dan pada tahun 1948, kekuatan komunis menghapus institusi ini dengan tradisi yang panjang.

Konstitusi Rumania tahun 1991 mengembalikan *Court of Accounts* di antara lembaga-lembaga penting negara demokratis: *Court of Accounts* menjalankan kontrol atas cara pembentukan, administrasi, dan penggunaan sumber daya keuangan negara dan sektor publik. Tahun berikutnya, atas kehendak Parlemen, Undang-undang tentang organisasi dan pengoperasian *Court of Accounts* diadopsi dan kemudian diundangkan oleh Presiden Rumania, pada tanggal 8 September 1992.

Setelah pembentukannya kembali, *Court of Accounts* menerima kontrol berganda dan kekuasaan yurisdiksi, dengan maksud untuk memulihkan kerusakan yang ditemukan seefektif mungkin. Pada saat yang sama, melalui keterlibatan manajemen baru, *Court of Accounts* memperoleh perwakilan internasional, menjadi anggota organisasi lembaga audit tertinggi INTOSAI, EUROSAI, AISCCUF, logo mereka direproduksi sebagai sketsa minisheet hari jadi masalah perangko.

Momen penting dalam kehidupan lembaga tersebut adalah pendirian Otoritas Audit pada tahun 2005, sebuah badan yang secara operasional independen dari Pengadilan Akun, dengan peran melakukan audit publik eksternal atas dana Eropa.

Saat ini, *Court of Accounts* sedang melalui proses modernisasi ekstensif yang melibatkan transformasi kelembagaan dengan memodifikasi kerangka normatif spesifik dan menentukan tujuan strategis yang akan memandu aktivitasnya di tahun-tahun mendatang. Penting, dalam konteks domestik dan internasional saat ini, untuk beralih dari fungsi kontrol, khusus ke Pengadilan dengan yurisdiksi, ke fungsi audit, mengikuti model mayoritas lembaga audit tertinggi di Eropa.

Ada tiga dekade pencarian dan banyak perubahan di tingkat lembaga audit tertinggi Rumania. Setelah mencapai kedewasaan institusional setelah tahun-tahun kekacauan ini, Pengadilan Akun Rumania saat ini berada pada titik balik, dan langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk membuat proses modernisasi tidak dapat diubah. Dalam perjalanan menuju institusi modern yang memengaruhi kualitas kehidupan warga negara melalui aktivitasnya, tiga dekade ini merupakan pengalaman di mana masa depan dapat dibangun. Dua komponen diperlukan untuk keberhasilan proses ini: relevansi dalam masyarakat dan dampak melalui kualitas dan melalui tema audit yang dipilih.

LAMPIRAN II *RINGKASAN PENGADILAN AKUN ROMANIA*

Court of Accounts didirikan pada tahun 1864 berdasarkan hukum yang diadopsi oleh Jenderal Majelis Rumania, yang membentuk organisasi dan mode operasi yang sesuai ke sistem Prancis untuk regulasi/pemberlakuan manajemen *ex post control* dan menurut sistem Belgia untuk berlakunya modalitas untuk memilih dan menunjuk Anggota pengadilan.

Pada periode 1948-1992, hak prerogatif tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pengendalian Keuangan. Konstitusi Rumania diadopsi pada Rapat Majelis Konstituante November 1991 mengesahkan pendirian *Court of Accounts*. Operasi dan organisasi *Court of Accounts* didirikan pada tahun 1992 dengan hukum organiknya sendiri.

Di dalam sesuai dengan hukum organik, anggota Mahkamah diangkat oleh Parlemen, tetapi kegiatan kontrol dan yurisdiksi dibuka secara independen. Pada tahun 2003, sesuai dengan Konstitusi yang ditinjau, aktivitas yurisdiksi *Court of Accounts* adalah eksternalisasi ke pengadilan biasa.

Pada tahun 2008, hukum organik Pengadilan Akun adalah ditinjau dan diselaraskan dengan persyaratan standar INTOSAI yang berlaku saat itu tanggal. Struktur organisasi diwakili di tingkat pusat melalui audit dan kontrol Departemen, *Otoritas Audit* untuk dana Eropa dan oleh Sekretariat Jenderal, dan di tingkat teritorial (di setiap unit administratif/teritorial, masing-masing kabupaten) oleh kamar akun untuk audit dan kontrol dan kantor audit regional untuk dana Eropa (satu in masing-masing dari delapan wilayah Rumania).

Manajemen bersifat kolegial dan dilakukan oleh *Pleno Court of Accounts* terdiri dari 18 anggota, yang merupakan penasihat keuangan, yang ditunjuk oleh Parlemen untuk sembilan tahun masa jabatan. Pengelolaan kegiatan saat ini bersifat eksekutif dalam bentuk barang dan dilakukan oleh presiden dibantu oleh dua wakil presiden. Kamar dari rekening dikelola oleh seorang direktur dibantu oleh seorang wakil direktur, dan kantor wilayah oleh a kepala Kantor. Instrumen utama yang mentransposisikan dalam praktek prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas standar audit ISSAI 20 dan 21, diambil alih di *Court of Accounts 2* standarnya sendiri, apakah laporannya disusun dan diserahkan ke DPR, ke Pemerintah dan untuk otoritas publik deliberatif dari unit administratif-teritorial, yang ditempatkan di Pengadilan situs Akun www.curteadeconturi.ro untuk penerima manfaat lainnya (media massa, akademik, lingkungan bisnis, pembayar pajak, dll.)